JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 43-45

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

PENGARUH RASIO DESENTRALISASI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Maria Leatitia Boliina Kromen
Universitas Aryasatya Deo Muri

marialaetitiaboliinakormen@gmail.com

Abstrak

Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Rasio Desentralisasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengetahui signifikansi rasio desentralisasi terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sampel yang dalam penelitian ini adalah 22 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejak tahun 2017-2021. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan analisis statistik deskriptif serta inferensial dengan aplikasi Eviews 9.

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa 22 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memenuhi kriteria karena seluruh data laporan raealisasi APBD telah lolos uji asumsi klasik normalitas yang mana hasil pengujian menunjukan bahwa seluruh data terdistribusi normal, pada uji asumsi klasik multikolinearitas hasil pengujian menunjukan seluruh data dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas, begitu juga dengan uji asumsi klasik heterokedastisitas hasil pengujian menunjukan bahwa seluruh data penelitian tidak mengalami masalah heterokedastisitas, dan pada uji asumsi klasik autokorelasi hasil pengujian menunjukan bahwa seluruh data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Hasil analisis inferensial secara parsial menunjukan Rasio Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai R Square menunjukan bahwa kontribusi Rasio Desentralisasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 91%, sedangkan sisanya 9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Kata Kunci

Rasio Desentralisasi, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

The purpose of this study is to find out the influence of decentralization risk on human development index in districts and cities throughout East Nusa Tenggara province to find out the significance of the decentralization ratio to the human development index. This research uses a quantitative method of samples which in this study are 22 districts and cities throughout the province of East Nusa Tenggara using the report of revenue and regional expenditure budget realization since 2017 2021 data collection using documentation techniques and descriptive and inferential statistical analysis with the Eviews 9.

The results of the descriptive analysis show that 22 districts and cities in the province of East Nusa Tenggara have met the criteria because all APBD realization report data have passed the normality classical assumption test where the test results show that all data are distributed normall, In the classic assumption test of, the test Multicollinearity results showed that the data in this study did not experience the problem of Multicollinearity, Similarly, the classical heteroscedasticity assumption test results indicate that all research data do not experience heteroscedasticity, and the classical autocorrelation assumption test results indicate that all data in this study do not exhibit autocorrelation.

The partial inferential analysis results indicate that the Decentralization Ratio has a positive and significant effect on the Human Development Index. The R-square value indicates that the Decentralization Ratio contributes 91% to the Human Development Index, while the remaining 9% is influenced by other variables outside the studied model.

Keywords

Decentralization Ratio, Human Development Index

Pendahuluan

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. yang merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan di suatu wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. (Arsyad, 1999 109) menjelaskan masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana rasio desentralisasi, sebagai indikator kapasitas fiskal daerah, dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Kajian ini juga memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas otonomi fiskal dalam konteks pembangunan manusia di wilayah yang secara geografis dan sosial memiliki tantangan tersendiri, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tinjauan Pustaka

Rasio Desentralisasi merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Rasio ini mengindikasikan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mencakup tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Penelitian sebelumnya (Fitriani & Handoyo, 2020) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan fiskal daerah berhubungan positif dengan IPM.
Penelitian ini memperkaya literatur dengan meneliti keterkaitan kedua variabel tersebut di konteks wilayah kepulauan dan tertinggal seperti NTT, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2017–2021.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, dan data dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan aplikasi Eviews 9. Uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) dilakukan untuk memastikan validitas model regresi.

Temuan

Hasil Uji Asumsi Klasik:
1. Normalitas: Seluruh data terdistribusi normal.
2. Multikolinearitas: Tidak ditemukan indikasi multikolinearitas.
3. Heteroskedastisitas: Tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Autokorelasi: Tidak ditemukan autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi:
1. Rasio desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
2. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 91%, menunjukkan bahwa variabel rasio desentralisasi mampu menjelaskan variasi IPM secara dominan.

Diskusi

Temuan ini menegaskan bahwa semakin besar kemampuan fiskal daerah (diukur melalui rasio desentralisasi), maka semakin besar pula potensi peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan teori otonomi daerah yang menyatakan bahwa desentralisasi memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan lokal secara lebih tepat.
Namun, meskipun kontribusinya besar (91%), masih ada 9% variabel lain yang belum diteliti, seperti efisiensi belanja daerah, kualitas birokrasi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian di masa depan perlu mempertimbangkan variabel-variabel tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rasio Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini menunjukkan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan manusia dapat lebih optimal.
Saran: Penelitian lanjutan dapat memperluas model dengan menambahkan variabel lain seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan belanja infrastruktur, serta melakukan pendekatan panel data dengan metode yang lebih robust.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Daftar Pustaka

Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Fitriani, D., & Handoyo, T. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 155–167.

BPS. (2021). *Laporan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017–2021*.

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurkholis. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Keuangan Publik, 10(2), 123–138.

Pratikno, T. (2008). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Antara Demokratisasi dan Efisiensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.

UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. New York: United Nations Development Programme.